

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamid S Attamini, *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indoneisa: Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, BP.7 Pusat, 1991.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta, Meiton Putra, 1987.
- Adwin Rahadian Megantara, *Catatan Kritis Omnibus Law – UU Cipta Kerja dalam Sudut Pandang Hukum Administrasi Pemerintahan*, Deepublish Publisher, Sleman, 2021
- Agus Yusoff dan Andi Yusran, *Desentralisasi Otonomi Luas ke Otonomi Terpimpin*, Pekanbaru Riau, Suska Press, 2007.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Ghalia: Ciawi-Bogor. 2007.
- Aldwin Rahadian Megantara, *Catatan Kritis Omnis Law UU Cipta Kerja Dalam Sudut Pandang Hukum Administrasi Pemerintahan*. CV. Budi Utama: Yogyakarta
- Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997.
- Audrey O'Brien dan Robert Bosc, *"House of Commons Procedure and Practice."*, 2nd. Editions Yvon Blais, 2009
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Galia Indonesia, 2007.
- Hans Kelsen. 1979. *Allgemeine der Normen*. Wien Manz, 1979.
- Hans Kelsen. *General Theory of Norms*, translated by Michael Hartney. Oxford: Clarendon Press. 1991.

- Indoharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Indra J. Piliang ed, *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003.
- Jimly Asshiddiwe dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, KON Press, 2006.
- Jimly Asshiddiwe, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta, KONSTITUSI – Press, 2006.
- Jimly Asshiddiwe. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer. 2007.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan metode penelitian hukum normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010.
- Louis Massicotte, “*Omibus Bill in Theory and Practice*”, *Canadian Parliamentary Review*, Spring 2013.
- M Agus Santoso, *Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indoneisa*, 2009.
- M. Mas'ud, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan I*, Yogyakarta, Kanisius, 2011.
- Maria Farida Indrawati, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Jakarta, Kanisius, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Buku 1*. Bandung: PT. Alumni. 2009.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta, UII Press, 2006.
- Nandang Alamsah Dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Unpad Press, November 2017.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rachmadi Usman. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*. Penerbit Djambatan. Jakarta. 2000.
- Saiman, *Politik Perbatasan Inteligensi*, Malang, Media, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soegiyoni, *Pentingnya Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan*, 2020.
- Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hal. 56
- Subekti, *Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1965.
- Sudikno Merokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Universitas Atma jaya: Yogyakarta. 2010.
- Sudikno Merokusumo, *The Liang Gie*. 2010.
- Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni Bandung, 1991.
- Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta, LIPPI Press, 2007.
- Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2009.
- Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Indonesia*, Malang: Setara Press, 2009
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Karya Ilmiah

- Agnes Ruth Febianti Relaksasi Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan Dan Bisnis Relaxation of Permits Environment in The Law Number 11 Of 2020 On Job Creation: The Impact on The

Environment Sustainability and Business, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- Agus Suntoro, *IMPLEMENTASI PENCAPAIAN SECARA PROGRESIF DALAM OMNIBUS LAW CIPTA KERJA (The Implementation of Progressive Realization at Omnibus Law)*, JURNAL HAM, Volume 12, Nomor 1, April 2021.
- Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, *PERKEMBANGAN HUKUM INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN UNIFIKASI DAN KODIFIKASI HUKUM*, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
- Andi Islamuddin, *Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 10, Oktober 2021.
- Andri Gunawan Wibisana, *UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN STRICT LIABILITY OMNIBUS LAW ON JOB CREATION AND STRICT LIABILITY*, Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021.
- Anggraeny Arief, Rizki Ramadani, *Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 6 No. 2, Juli 2021.
- Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, 17. No. 1, 2020
- Arya Setya Novanto, Ratna Herawati, *Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia*, Jurnal USM law Review Vol 5 No. 1 Tahun 2022
- Ateng Syafrudin, “Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Bandung. Universitas Parahyangan, 2000.
- Bahir Mukhammad, *PELAKSANAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA*, Jurnal keadilan, Volume 1 Nomor 2, November 2021
- Bayu Dwi Anggono, “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding Vol 9 No 1, April 2020.
- Bayu Dwi Anggono, *Asas Materi Muatan yang Tepat dalam Pembentukan Peraturan Undang-undang, serta Akibat Hukumnya: Analisis Undang-undang Republik Indonesia yang Dibentuk pada Era Reformasi (1999-2012)*, Disertasi Doktor, Universitas Indonesia: Jakarta, 2014.

- Djarmiko, Wahyu P. *Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Yang Responsif Dalam Perspektif Teori J.H. Merryman Tentang Strategi Pembangunan Hukum*. Jurnal Arena Hukum, Vol.11, 2018
- Dolfries J Neununy, *Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Saumlaki, Indonesia, BALOBE Law, Journal Vol. 1 No. 2, Oktober 2021*.
- Dwi Kusumo Wardhani, *Disharmoni Antara RUndang-Undang Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*, Jurnal Komunikasi (Jkh), Universitas Pendidikan ganesha, 6.2, 2020.
- Edy Sujendro, *GAGASAN PENGATURAN KODIFIKASI DAN UNIFIKASI PERATURAN PERUBAHAN DAN PERATURAN OMNIBUS LAW*, Jurnal USM Law Review Vol 3 No 2 Tahun 2020.
- Elita Rahmi, *PROSPEKTIF OMNIBUS LAW BIDANG SUMBER DAYA ALAM OMNIBUS LAW PROSPECTIVE ON NATURAL RESOURCES*, Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021.
- F. F Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Arena Hukum, 2017
- Firman Freaddy Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, ARENA HUKUM. Vol. 10, Nomor 2, Agustus 2017.
- Gunanegara, *Kebijakan Negara Pada Pengaturan Hak Atas Tanah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2022
- Helmi, *Kedudukan UU Cipta Kerja Terhadap UU-PPLH dan Implikasinya*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2021
- Hidayat Syarief, *Mengurai Peristiwa-Meretas Karsa: Refleksi Satu Dasa Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Prisma, 29.Nomor 3.
- Ichwan Ahnaz Alamudi, *Tarik-Menarik Kepentingan Dalam Legislasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja*, UIN Antasari, Banjarmasin, Vol. 1 No. 1, Maret 2023.
- Jimly Asshiddiqie, *“Menelaah Putusan Mahkamah Agung tentang Judicial Review atas PP No. 19/2000 yang bertentangan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999”*, (tanpa tempat, tanpa tahun)
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, Rajawali Pers, Jakarta 2011.

Johan, *Perizinan Berusaha Didaerah Dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2022.

Kania Venisa Rachim dkk, *OMNIBUS LAW DALAM KONSTITUSI INDONESIA (Studi Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina)*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023.

Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1.

Mahfud MD, *Jurnal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan*, 23 Desember 2015, Jakarta

Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2011.

Mailinda Eka Yuniza, *Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Cipta Kerja Diundangkan*, De Jure, Universitas Gajah Mada, Volume 13 Nomor 2, Oktober 2021.

Maria Farida Indrati S. “*Omnibus Law, UU Sapu Jagat?*”. Koran Kompas edisi Sabtu 4 januari 2020.

Maria Farida Indrati, “*Menyikapi Omnibus Law sebagai Undang-Undang Sapu Jagad*”, makalah disampaikan di Seminar: Menyikapi Omnibus Law Pro Dan Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja, Jakarta, 06 Februari 2020.

Merike Ristikvi. *The Position of latin in the Development of Law. Juridica International X*. 2005.

Moch. Gandi Nur Fasha, *Politik Hukum Penghapusan Hak Gugat Administratif Pada Persetujuan Lingkungan dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022.

Moza Dela Fudika, *Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 19 No. 2 - Juni 2022.

Muhamad Iqbal Susanto, *Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2.2, 2019, hlm. 2019.

Muhammad Ilham Nur, *PERSETUJUAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN DAMPAK DARI UU CIPTAKER BAGI LINGKUNGAN*, Vol. 2 No. 12 Desember 2021.

- Muhammad Irham Roihan, *Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang- Undangan Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*, Tesis, merujuk Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law, Jurnal Gema Keadilan Vol 6, Oktober-November 2019.
- Muhammad Irham Roihan, *Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang- Undangan Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*, Tesis, Program Pascasarjana FAKULTAS HUKUM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.
- Nada I Asmani, *Penolakan Omnibus Law Menurut Paradigma Sosiologi Hukum dan Teori Konflik*, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Nila Amania, *PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo, Vol. VI No. 02, November 2020.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah Pada Peraturan Hukum Administratis*, Fakultas Hukum, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie; SH., *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, 2019.
- Ramanata Disurya, *PELANGGARAN ASAS DALAM PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA*, Volume 19 Nomor 1, Bulan Januari 2021.
- Rifqi Ihsanuddin Wibowo, Skripsi, *Perbandingan Perizinan Umkm Sebelum Dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Mashlahah*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.
- Riska Putri Wardani, *ANALISIS UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM KOREHENSITEORI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG*, Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 4, Year 2022,
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1998, hal. 13. sebagaimana dikutip

- Rusadi Kantaprawira, *Makalah Hukum dan Kekuasaan*, 1998.
- Salmon Bihuku, *Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Lex Administratum, VI.1.
- Sirajuddin Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang, Setara Press, 2015 *Sebagaimana dikutip didalam Laporan penelitian Masa Depan Otonomi Daerah Terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Resentralisasi ataukah Desentralisasi)*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, 2021.
- Siti Amaliah, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- Sri Subekti, *PENTINGNYA PERAN MASYARAKAT DALAM AMDAL DEMI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN MK No. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG JUDICIAL RIVIEW UU No.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Volume 12 Nomor 3, Maret 2023.
- Sriayu Aritha Panggabean, *Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Mikro*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Washliyah, Vol 6 No 2, Juni 2023.
- Suryati dkk, *Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja*, SIMBUR CAHAYA, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia.
- Tamora Nonia Wijaya dkk, *Analisis Sentimen Opini Publik Tentang Undang-Undang Cipta Kerja Pada Twitter*, Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering, Volume 3 Nomor 2 Juli 2021.
- The New Encylopaedia Britanica, Micropaedia*, Vol V., Ed. 15th (Chicago William Benton Publisherm 1983)
- Wicipto Setyadi, *Makalah dalam diskusi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, 2009.
- Yuliandri Tim Pengkajian Hukum, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah dan Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Draft RUU Cipta Kerja

Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2009.

Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Rekapitulasi Perkara pengujian undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kelistrikan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

D. Internet

“Omnibus Law’ kemudian ditemukan didalam RUU Cipta Kerja yang kemudian mengidentifikasi 74 UU dalam satu regulasi. Kompas, 12 Februari 2020.

Detik.com, 24 Mei 2023

<https://setkab.go.id/daftar-tautan-49-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja/>

Hukumonline, Ini 15 Putusan MK yang Dikabulkan Selama 2018, 8 Februari 2019

Hukumonline, MK Hanya Kabulkan 4 Pengujian UU Sepanjang 2019, 2 Januari 2020

Hukumonline, Putusan MK yang jadi Perhatian public sepanjang 2020, 28 Desember 2020

Hukumonline.com, Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia, dipublikasi pada Jum’at, 17 February 2017.

Komnas HAM, Jadikan Bumi Bersih dan Hijau – Hak atas lingkungan hidup adalah hak asasi manusia

KOMNAS HAM, Omnibus Law Ruu Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, 2021

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2012, 26 Februari 2013

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi tahun 2016, 7 Februari 2017

Laporan Kinerja MK tahun 2014, 26 Januari 2015

Osgar Sahim Matompo dan Wafda vivid Izziyana, Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja, *Rechstaat Nieuw* (Aturan Hukum Baru), 5.1, 2020, hlm. 4,
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/(1) KONSEP OMNIBUS
LAWDAN PERMASALAHAN RUNDANG- UNDANG CIPTA
KERJA.pdf

Surat Presiden Nomor “R-06/Pres/02/2020” pada 7 Februari 2020.